

---

## PASANG SURUT GERAKAN BURUH INDONESIA

**Bambang Sulistyio**

*Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin.<sup>1</sup>*

---

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji gerakan buruh di Indonesia sejak diberlakukannya sistem tanam paksa sampai dengan tahun 1965. Pengkajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa saat ini hubungan antara buruh dan masyarakat renggang. Kehadiran buruh dalam aksi-aksi demonstrasi tidak dilihat masyarakat sebagai upaya untuk memperjuangkan kesamaan nasib, tetapi dilihat sebagai ancaman yang mengganggu ketertiban dalam masyarakat tersebut.

Melalui penelusuran sejarah buruh di Indonesia sejak periode Tanam Paksa yang dianggap sebagai kemunculan buruh di Indonesia didapati bahwa gerakan buruh periode kolonial masih memiliki kesamaan dengan masyarakat, yaitu untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari penjajahan kolonial, dan untuk membentuk negara yang mensejahterakan masyarakat dan buruh. Kesamaan persepsi ini kemudian berubah sejak meletusnya peristiwa 30 September 1965. Buruh ditempatkan rezim penguasa Orde Baru sebagai bagian dari gerakan tersebut dan melalui doktrin yang dibangun penguasa Orde Baru, lambat laun buruh ditempatkan terpisah dengan masyarakat.

Dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa gerakan buruh di Indonesia tidak mengikuti konsep kesadaran kelas seperti di Barat, tetapi kesadaran etnis, persamaan kebudayaan dan jenis pekerjaan.

Kata Kunci: Gerakan Buruh, Masyarakat, Indonesia

### Abstract

This paper studies labor movement in Indonesia and it attempts to understand the reason of the distancing of relation between labor and the society. Labor activities in demonstration actions were not seen by the society as a struggle for equal conditions but are seen as threats to public order within the society.

By tracing labor history in Indonesia since the forced cultivation era in the 19th century which can be seen as the moment of the emergence of labor in Indonesia, it can be seen that at the time there were close connections between labor and societies who both worked to liberate the Indonesian society from colonial domination and to create a state who would improve the welfare of the society and labor themselves. This parallel view would later change after the 30 September tragedy when labor were coopted by the New Order regime and through indoctrination were separated from the society.

This paper will also explain that labor movement in Indonesia does not follow the concept of class consciousness as in the West, but based on ethnic and cultural identities and on types of occupation.

Keywords: Labor movement, society, Indonesia

---

Author correspondence

Email: bambang5ulistyio@yahoo.com

Available online at <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb>

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia pada umumnya, cemas, takut dan was-was terhadap keberadaan buruh. Kehadiran buruh, terlebih lagi gerakan protesnya, bukan diterima dengan rasa iba, simpati dan keprihatinan atas kehidupan buruh yang miskin dan menderita akibat beban hidup yang makin berat, melainkan menimbulkan kegelisahan, dan kegusaran, bahkan kemarahan. Kehadiran kerumunan buruh mendorong mereka untuk melakukan berbagai tindak antisipasif berupa upaya mengundang satuan aparat keamanan, polisi, intelejen dan lain-lain. Masyarakat takut bahwa keberadaan massa buruh di suatu tempat akan diikuti dengan berbagai tindakan kerusuhan, huru-hara, kekacauan, anarkis dan pemberontakan. Hal ini berbeda dengan masa lampau sejarah Indonesia. Kekuatiran itu sangat berlebihan. Buruh Indonesia tumbuh sebagai konsekwensi penjajahan atau dengan kata lain buruh identik dengan rakyat bumi putera yang terjajah. Perjuangan buruh identik dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu buruh dipandang sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia yang terjajah. Dengan demikian mengapa kini demikian buruk pandangan masyarakat terhadap buruh? Jawabannya sudah tentu bahwa gerakan buruh Indonesia di sepanjang sejarahnya telah mengalami kegagalan.

Dalam tulisan ini dibahas pasang surut sejarah buruh Indonesia. Diawali pada masa kolonial ketika diberlakukan Sistem Tanam Paksa dan berakhir pada tahun 1965. Pembahasan meliputi hubungan sesama buruh, serikat sekerja dan pengusaha serta Negara.

## PEMBAHASAN

### **Munculnya Buruh Masa Kolonial dan Pergerakan Nasional Indonesia.**

Sesudah Perang Jawa (1825-1935) tidak ada lagi perang besar yang melibatkan para raja di Jawa. Perang ini telah mengakibatkan sepertiga penduduk Jawa musnah. Penduduk yang masih hidup hampir seluruhnya petani diperlakukan sebagai budak dengan ditetapkannya *Cultuur Stelsel* (Sistem Tanam Paksa), pada tahun 1830. Pada tahun 1870 kebijakan diubah dengan dimunculkannya kebijakan Politik Liberal (*Open Door Policy*), pemerintah melepaskan monopoli ekonominya, dan eksploitasi ekonomi diserahkan kepada sektor swasta. Pada periode ini juga bermunculanlah perusahaan-perusahaan Barat dalam bentuk perkebunan-perkebunan di Jawa dan Sumatera, yang dikerjakan dengan mendatangkan buruh dari Cina dan Jawa. Pembukaan perkebunan dan pengelolaannya dilakukan dengan mengerahkan buruh tani yang dibantu oleh para birokrat Kolonial dan tradisional sejak dari Residen sampai pada kepala desa. Kota-kota seperti Batavia, Cirebon, Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan Surakarta, dan kota-kota lainnya menjadi sumber pemasok pekerja, yang pada awalnya dalam bentuk migrasi sirkuler ke perkebunan-perkebunan di sekitarnya.

Periode-periode ini merupakan masa penderitaan. Petani Jawa dalam ketidakberdayaannya karena ditinggalkan rajanya, yang telah beralih menjadi birokrat kolonial, mencari penyelesaian masalahnya sendiri dengan cara irrasional yakni lewat perkumpulan-perkumpulan keagamaan. Pondok-pondok pesantrenpun berkembang. Perlawanan-perlawanan petani berkembang dalam bentuk gerakan keagamaan atau gerakan Ratu Adil.<sup>2</sup> Namun sudah tentu perlawanan-perlawanan itu berakhir dengan kekalahan penduduk pribumi. Sejak 1912 berkembang SDI (Sarekat Dagang Islam) selanjutnya berubah menjadi Sarekat Islam (SI), maka sehubungan dengan kesulitan hidup yang makin meningkat maka perlawanan-perlawanan ini dikoordinasi di bawah panji-panji Sarekat Islam lokal.

Pada tahun 1914 terdapat peristiwa penting dalam gerakan buruh. Pada masa ini Henk Sneevliet seorang Marxis dari negeri Belanda, datang ke Surabaya mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV), yang diperuntukan bagi seluruh golongan

pekerja tanpa membeda-bedakan ras dan etnis. Akan tetapi karena sulit berkembang akhirnya memindahkan perhimpunannya ke Semarang setelah Sneevliet berkenalan dengan Semaun ketua *Vereeniging voor Spoor - en Tramwegpersoneel* yang lazim disingkat VSTP atau Serikat Sekerja Kereta Api dan ketua Sarekat Islam Lokal Semarang. Lewat dukungan Sarekat Islam lokal Semarang, ISDV berhasil mengembangkan perhimpunannya yang ditandai dengan berdirinya serikat-serikat pekerja yang berafiliasi dengan Sarekat Islam. Lewat ajarannya gerakan buruh modern (yang ditandai dengan pembentukan organisasi) dimulai. Demikian akhirnya pada tahun 1919 telah berdiri 44 Sarekat Sekerja yang bergabung dalam *Vak* Sentral Pergerakan Kaum Buruh Bumiputra di bawah koordinasi Sarekat Islam.<sup>3</sup>

Gerakan buruh terpenting pada masa itu adalah buruh pabrik gula.<sup>4</sup> Keberadaan sarekat pekerja oleh pemerintah kolonial misalnya di perkebunan tebu diterima dengan simpati oleh pemerintah kolonial karena merubah gerakan protes buruh dari yang menggunakan kekerasan menjadi dialog atau berunding. Khusus tentang pabrik gula pada masa itu telah mengantarkan Indonesia sebagai eksportir gula terbesar dunia, di mana sesudah berakhirnya Perang Dunia I ekspor gula mengalami kemajuan pesat. Ekspor gula dari Indonesia ke Eropa melimpah, pengusaha pabrik gula memperoleh keuntungan dua kali lipat, tetapi membiarkan buruhnya kelaparan. Kondisi perburuhan yang buruk dan sikap pemerintah itu menjadikan tahun 1919-1920 adalah tahun-tahun pemogokan. Pemogokan terjadi di pelabuhan, pegadaian, percetakan, kehutanan dan lain-lain. Sarekat sekerja pabrik gula yakni *Personeel Fabriek Bond* (PFB) memperjuangkan perbaikan kehidupan buruh dengan menggunakan dialog berupa perundingan dan pemogokan sebagai media perjuangan. Dengan cara ini PFB menjadi organisasi buruh terbesar di Indonesia, ia memiliki cabang di 190 pabrik gula di Jawa.<sup>5</sup> Menarik dalam kasus ini tentang keterlibatan Asisten Residen, Residen dan Gubernur Jenderal, dalam mengatasi perselisihan perburuhan. Gubernur Jenderal di Weltevreden (Bogor) mengundang petani dan buruh tani yang melakukan berbagai tindakan protes dan pemogokan di Bantool, Yogyakarta Selatan. Hasilnya beberapa bulan kemudian Bupati Bantool, dipecat, yang sebelumnya diberhentikan untuk sementara oleh Sultan Yogyakarta.<sup>6</sup> Pada kasus-kasus di berbagai tempat pemerintah Asisten Residen dan Residen justru memerintahkan para pengusaha berunding dan menaikkan gaji buruh yang mogok. Serikat buruh berkembang luas tidak hanya di Jawa tetapi juga di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain, bahkan memiliki jaringan dengan gerakan komunis Internasional.

Perkembangan di Sumatera Timur lebih menarik lagi. Pada tahun 1907 pemerintah membentuk *Arbeid Inspectie*, yang beranggotakan anggota *Tweede Kamer* (misalnya van Kol dan van der Brand) yang mengusulkan kuli kontrak dan *poenale sanksie* dihapuskan dan digantikan dengan *Vrije Arbeid*.<sup>7</sup> Seorang anggota *Tweede Kamer* (Dewan Rakyat Belanda), justru yang meneliti tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pengusaha perkebunan. Hasilnya setelah dibawa ke sidang-sidang *Tweede Kamer*, *Poenali Sanksie* (hukuman badan) dilarang dan pada tahun 1932 kuli kontrak (Sistem Kontrak) yang diberlakukan sejak tahun 1870 dihapuskan.

Perbedaan konsep ekonomi antara komunis dan Islam menjadi kendala penyatuan antara komunis dan Islam. Islam menghalalkan bahkan menganjurkan kapitalisme jika ingin sejahtera. Nabi Muhammad adalah pedagang, dan menganjurkan umatnya berdagang jika ingin sejahtera. Oleh karena itu basis utama Sarekat Islam adalah pedagang dan pengusaha. Pada sisi lain lewat gagasan Karl Marx, seperti yang diajarkan para pimpinan ISDV bahwa proses sejarah umat manusia adalah perjuangan antara buruh melawan maji-

kannya. Dengan ajaran itu, buruh memahami bahwa kemiskinannya karena dieksploitasi oleh majikan yang kapitalistik. Majikan semakin kaya dan buruhnya semakin miskin. Tujuan perjuangan komunis adalah terwujudnya masyarakat proletar yang tidak berkelas, yang di dalamnya tidak ada kapitalis. Hak milik menjadi wewenang Negara yang diberikan kepada rakyat secara adil. Keberadaan kapitalis dipandang merupakan awal eksploitasi buruh.

Islam juga mengajarkan kepedulian umatnya kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu simpati kepada golongan proletar yang menjadi basis massa komunis. Dalam posisi antara kedua ideologi itu maka komunis lebih bersifat agresif kepada Sarekat Islam. Oleh karena itu pada mulanya Sarekat Islam dapat berdampingan dengan ISDV. Akan tetapi karena sifat komunis yang agresif berakibat solidaritas dengan pihak komunis mengalami kerenggangan dalam bentuk muncul Sarekat Islam Merah yang berkedudukan di Semarang dan Sarekat Islam Putih, yang berkedudukan di Yogyakarta.

Ide Marxis memang nyata pada masyarakat kolonial yang rasialis. Pada masa itu hirarki sosial di tempat kerja disusun berdasarkan ras dan etnis. Pada perusahaan-perusahaan besar dapat ditemukan hirarki sosial sebagai berikut: pada puncak hirarki ditempati orang-orang Belanda, di bawahnya orang-orang Indo-Eropa, dibawahnya lagi jika ada adalah golongan Timur Asing seperti Arab, India dan Cina, lapisan berikutnya jika ada adalah orang Manado dan Ambon, yang terbawah adalah penduduk bumiputra. Aparat keamanan apabila tidak dijabat penguasa setempat adalah dari kalangan orang Manado, Ambon dan Batak yang bersedia menerima agama Kristen sebagai agamanya. Diskriminasi seringkali juga terjadi pada hubungan-hubungan sosial dan kebudayaan di luar hubungan-hubungan sosial. Oleh karena itu sampai tahun 1920 SI merah dan putih bekerjasama menentang kolonialisme.

Pengaruh Revolusi Bolshevijk Februari 1917 yang menumbangkan Kekaisaran Rusia mempengaruhi gerakan Partai Komunis Hindia menjadi radikal.<sup>8</sup> Perpecahan memuncak ketika Sarekat Islam Merah mendirikan Perserikatan Komunis Hindia pada tahun 1921 yang kemudian di tahun 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tjokroaminoto sebagai ketua Pengurus Besar Sarekat Islam memberlakukan disiplin partai yang isinya larangan menjadi anggota dua partai. Akibatnya sarekat buruh pecah menjadi dua bagian yakni menjadi *onderbouw* PKI dan yang lain *onderbouw* Partai Sarekat Islam. Perubahan nama ini menunjukkan perubahan ideologi dari yang sebelumnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan buruh dan kemerdekaan Indonesia, menjadi mewujudkan masyarakat komunis yang tanpa kelas, sama rata dan sama rasa. PKI selanjutnya menjalin hubungan dengan Komunis Internasional (Komintern), yang berpusat di Moskwa. Tan Malaka salah seorang pemimpin PKI diangkat sebagai Wakil Ketua *Komintern wilayah Asia Timur*.

Masuknya ideologi Marxis mendorong gerakan buruh yang bertujuan mendirikan Negara, untuk itu maka pada tahun 1926-1927, PKI melakukan pemberontakan. Namun sarekat sekerja/buruh yang berafiliasi dengan Sarekat Islam tidak mendukungnya sehingga pemberontakan hanya terjadi di Banten, sekitar Jakarta, dan Sumatera Barat, oleh karena itu mudah dikalahkan. Partai Komunis selanjutnya dinyatakan sebagai partai terlarang. Gerakan buruh mengalami kemunduran drastis. Gerakan buruh terpecah-belah dan disubordinasikan pada partai-partai politik. Partai Sarekat Islam terus-menerus mengalami kemunduran, karena kehilangan basis massanya, yang berpendapat bahwa Partai Sarekat Islam adalah partai kapitalis. Meskipun Tjokroaminoto mengklaim bahwa para anggotanya bukan kapitalis yang berdosa, karena tidak eksploitatif, bahkan selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan buruhnya tetapi jumlah pengikutnya terus merosot. Sehubungan dengan

pertentangan antara PKI dan PSI (Persatuan Sarekat Islam), dan larangan pemerintah atas aktivitas PKI, maka Sukarno pada tahun 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan mengalihkan gerakan buruh sebagai bagian (*onderbouw*) nya. Organisasi buruh PNI pada masa itu adalah Sarekat Kaum Buruh Indonesia (SKBI). Pada mulanya PNI ditujukan pada semua orang tanpa membedakan ras, golongan dan agama. Namun memiliki ideologi Marhaenisme. Marhaen bagi Sukarno adalah petani kecil yang menggarap tanahnya sendiri. Berbeda dengan komunis, dengan PNI-nya Sukarno mendambakan suatu masyarakat sosialis yang terdiri dari para Marhaen, yang tidak bersifat kapitalis. Masyarakat Marhaenis bersifat religius dan mengembangkan bentuk perekonomiannya berupa koperasi. Dalam konsep ini Sukarno mendapat dukungan Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir. Ideologi yang anti kapitalis mendorong PNI dapat diterima oleh orang-orang mantan komunis.

Namun gagasan Sukarno untuk mewujudkan masyarakat sosialis tidak ditanggapi orang-orang Belanda, oleh karenanya perjuangan PNI berubah menjadi radikal yang mencapai kemerdekaan sekarang juga. Perubahan ini menyebabkan pemerintah Belanda menangkapnya bersama dengan para pemimpin lainnya. Gerakan buruh selanjutnya dialihkan lagi pada Partindo (Partai Indonesia), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru).

Meskipun demikian nasib buruh mendapat perhatian di kalangan elit agama dan politik Marxis Kolonial. Mereka mendapat pembelaan di kalangan anggota *Volksraad* dan *Tweede Kamer* sehingga *poenali sanks* dan *sistem kontrak* yang diterapkan di berbagai perkebunan di Sumatera Timur dihapuskan pada tahun 1932. Partai buruh Belanda seperti *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* dan *Sociaal-Democratische Partij* berperan mewujudkan gagasan Marxis di Indonesia bahkan negeri Belanda. Oleh karena itu buruh relatif diberi kebebasan berserikat sepanjang tidak melawan pemerintah.

Demikian akhirnya Partindo dan PNI Baru juga dibubarkan pemerintah karena bersifat nonkooperatif terhadap pemerintah. Maka sarekat sekerja buruh menjadi bagian dari Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) dan Parindra (Partai Indonesia Raya), meskipun ada juga yang bergabung dengan Partai Sarekat Islam. Pada jaman pendudukan Jepang tidak ada sarekat sekerja dan partai politik karena dilarang Pemerintah Jepang. Namun Jepang membebaskan Sukarno, Hatta dan Syahrir dari penjara Belanda. Sukarno dan Hatta selanjutnya bersedia bekerjasama dengan Jepang. Keduanya setelah didesak sekelompok pemuda dengan bantuan Jepang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Negara yang diproklamasikan adalah seperti yang diidealkan Sukarno dan Hatta yang memihak dan melindungi orang kecil termasuk buruh dan tani yang terpinggirkan, meskipun nampak ada peran ekonomi liberalis dan kapitalis tetapi tidak ditonjolkan (Baca pasal 33 dan 34 UUD 1945).

### **Gerakan Buruh Masa Awal Kemerdekaan**

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (tahun 1945) sampai 4 September 1945 Kabinet Presiden I belum berbuat apa-apa,<sup>9</sup> Sukarno dan Hatta masih ragu dalam kepemimpinannya menghadapi Jepang. Oleh karena itu pada 11 September 1945 atas dasar gagasan Tan Malaka diselenggarakan demonstrasi besar-besaran di Surabaya, meskipun kekuasaan administrasi, kepolisian dan ketentaraan masih di tangan Jepang. Unjuk rasa ini membangkitkan berbagai demonstrasi dan pemogokan buruh sebagai bentuk aksi massa yang digagas Tan Malaka. Pada satu minggu berikutnya atas inisiatif para pemuda Menteng 31 dan Tan Malaka yang masih dalam penyamaran dengan nama Ilyas Hussain diselenggarakan rapat raksasa di Lapangan Ikada di Jakarta. Namun anehnya rapat ini segera ditutup Sukarno dengan pidato tidak lebih dari 10 menit, yakni seruan para pemuda untuk mening-

galkan lapangan.

Sukarno dan Hatta berbeda dalam membangun pilar politik Indonesia. Sukarno menghendaki kekuasaan partai tunggal untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Pada sisi lain Hatta berpendapat Indonesia bercorak multikultur sehingga upaya mempertahankan kemerdekaan agar mendapat dukungan rakyat banyak harus bersifat multi partai. Setelah kemerdekaan berlangsung beberapa lama dan Sekutu yang membawa Belanda semakin dekat, Sukarno ragu dengan pendapatnya, maka Hatta pun mengeluarkan Maklumat No. X pada 3 November 1945, yang memerintahkan rakyat mendirikan partai-partai politik untuk membela kemerdekaan Indonesia.<sup>10</sup> Organisasi sosial dan politik tumbuh bagaikan jamur di musim penghujan. Ketika pertempuran-pertempuran sudah mulai berlangsung baik melawan Jepang pada bulan Oktober dan awal November 1945<sup>11</sup>, bahkan Australia di luar Jawa, Sukarno dan Hatta masih meragukan tentang kebijakan yang diambilnya terhadap kehadiran Belanda, Jika ada justru dalam bentuk upaya mencegah pemuda melakukan perlawanan bersenjata.

Perkembangan terasa sangat pesat. Di Eropa terjadi perundingan-perundingan antara Inggris dan Belanda (Desember 1945 - Januari 1946), yang menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri melalui periode transisi, van Mook pun mengajukan konsepsi federal dan Negara Persemakmuran.<sup>12</sup> Dalam situasi krisis itu tampillah Tan Malaka, yang menyerukan pembentukan Persatuan Perjuangan. Pembentukan dilakukan di Purwakarta dengan dihadiri 48 organisasi. Di sini Tan Malaka menggariskan perjuangan kemerdekaan bahwa syarat perundingan dengan Belanda hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat pengakuan kemerdekaan 100 persen.<sup>13</sup> Tentara asing harus meninggalkan Indonesia terlebih dahulu. Tan Malaka juga menjelaskan bahwa otonomi, lingkup pengaruh, *commonwealth*, *dominion* dan persemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan membawa Indonesia pada status kolonial kembali, karena tidak adanya kelas menengah.<sup>14</sup> Pada bulan berikutnya Persatuan Perjuangan menyelenggarakan kongres ke-2 di Surakarta pada 26 Januari 1946, yang dihadiri 141 partai politik dan perjuangan di Jawa. Perjuangan kemerdekaan dengan demikian lebih ditentukan oleh Tan Malaka dan Persatuan Perjuangannya. Sikap ini menjadi sebab penangkapan Tan Malaka dan para sahabatnya ketika pemerintah memutuskan untuk berunding dengan pihak Inggris dan Belanda dengan pengangkatan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri.

Tan Malaka sebagai mantan ketua Komintern menghendaki suatu bentuk Negara federal dalam Komunis Internasional yang meliputi Asia Selatan (meliputi India, Burma, Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Filipina, Australia dan negara-negara lainnya). Namun gagasan ini dikuatirkan pemerintah hanya akan mengundang Sekutu untuk menghancurkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka akhirnya tidak dapat menahan kesabarannya ketika Sutan Syahrir diangkat sebagai perdana Menteri dan memimpin perundingan *Hooge Veluwe* pada bulan April 1946. Namun ketika akhirnya Tan Malaka dibebaskan kembali, pendiriannya tidak berubah dan mendalangi peristiwa 3 Juli 1946, berupa penculikan atas Perdana Menteri Syahrir. Akibat dari tindakan ini popularitas Tan Malaka jatuh. Sejak saat itu Tan Malaka dipandang sebagai lawan pemerintah. Akibatnya Tan Malaka justru menjadi musuh Negara. Perjuangan buruh dengan demikian tersebar pada berbagai organisasi seperti Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI), Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), PKI dan lain-lain yang berperan aktif dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Jepang dan Belanda baik milik negara maupun swasta.

Namun gerakan buruh kembali tidak populer ketika jatuh kepada pimpinan Musso. Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali dari Rusia, memimpin PKI yang telah dibentuknya

pada tahun 1935 (sebagai gerakan bawah tanah). Musso mengusulkan pembentukan Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk mengkoordinasi perjuangan kemerdekaan. Musso menyerukan agar golongan pekerja bergabung dalam satu front yang akan mengendalikan pemerintahan dan menolak kepemimpinan borjuis nasional yang bersifat kompromis dengan imperialis. Musso juga mengemukakan jalan baru dalam perjuangan pekerja yakni kapitalis tetap diertahankan untuk mengembangkan ekonomi nasional, tetapi hak-hak istimewa feodal dan asing harus dihapuskan termasuk para petani kaya. Gagasannya menarik perhatian para pemimpin buruh sehingga partai-partai buruh (Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis Indonesia atau Pesindo) menyatukan diri dalam PKI. Demikian juga Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI) menerima kepemimpinan Musso.<sup>15</sup> Namun ia melakukan kesalahan ketika memproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun pada 20 September 1948. Dengan proklamasi itu Musso memimpin revolusi agrarian pembunuhan-pembunuhan pada para pemilik tanah dan membagikannya kepada para proletar. Akibatnya gerakan tersebut ditumpas baik oleh TNI dan organisasi-organisasi perjuangan terutama yang bersifat keagamaan. Sejak itu berkembang lawan permanen PKI yakni TNI Angkatan Darat (TNI-AD).

### **Masa Demokrasi Parlementer – Demokrasi Terpimpin (1950-1965)**

Perjuangan kemerdekaan berakhir dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), Desember 1949 - Januari 1950. Perusahaan-perusahaan asing, yang telah dinasionalisasi oleh buruh dikembalikan kepada pemiliknya. Kapitalisme dan Kolonialisme Asing (Belanda) hadir kembali. Para pemimpin Republik menerima KMB sebagai strategi perjuangan. Para pemimpin menyadari hal ini berarti perjuangan belum selesai, karena Indonesia dipastikan akan kembali menjadi negeri jajahan Belanda. Organisasi-organisasi buruh akhirnya menjadi ujung tombak perjuangan yang strategis melawan Kapitalisme dan Kolonialisme dalam upaya memperoleh kedaulatan ekonomi nasional. PKI diijinkan berkembang kembali oleh Presiden Sukarno. Akhirnya PKI sebagai organisasi yang mengelola gerakan buruh berkembang sangat pesat.

PKI yang pada masa itu memiliki serikat buruh seperti BTI, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Persatuan Buruh Minyak (Perbum) dan lain-lain menjadi bulan-bulanan pembantaian serikat buruh lainnya termasuk Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM), dibawah PNI; Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI), Serikat Buruh Pegawai Daerah/SARBUMUSI keduanya berada di bawah Nahdatul Ulama (NU); Gerakan Organisasi Buruh Serikat Islam (GOBRI) di bawah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia) di bawah partai Murba, Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (KESPEKRI) di bawah Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Buruh Pancasila di bawah Partai Katolik Indonesia; Kesatuan Buruh Pancasila di bawah IPKI; selain itu masih terdapat serikat kerja yang tidak beafiliasi dengan partai politik seperti Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serba Usaha Gotong Royong), GAS-BINDO (Gabungan Serikat-serikat Buruh Islam Indonesia), SOKSI (Sentral Karyawan Seluruh Indonesia), SKBM (Serikat Kaum Buruh Minyak), SERBUMIT (Serikat Buruh Minyak dan Tambang), Serikat Buruh Industri dan Umum, SBPT (Serikat Buruh Perhubungan dan Transport) dan lain-lain.

Peran buruh yang menggoncangkan ekonomi dan politik memenuhi media pers nasional sejak 1950 bahkan 1965. Peran mereka telah berakibat banyak perusahaan asing mengalami kebangkrutan. Serikat Buruh dan Pekerja Republik Indonesia (SARBUPRI) bersama SOBSI berhasil memperoleh anggota lebih dari satu juta orang di seluruh Indonesia. SARBUPRI memiliki anggota 100.000 buruh di Sumatera Timur dan berhasil mem-

perjuangkan kenaikan upah-upah buruh sehingga sejak tahun 1940-1952 naik antara 3.000 sampai 3.500 persen dan perusahaan menempatkan buruh dan pekerjanya di tempat yang layak, yang bersih dan terang, tidak seperti masa sebelumnya di dalam barak.<sup>16</sup>

Partai politik bersaing memperebutkan basis anggotanya di perusahaan. Masing-masing partai mendorong serekat sekerjanya di perusahaan untuk melakukan berbagai penekanan pada perusahaan, sejak dari intimidasi, sabotase bahkan pemogokan yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi anggotanya. Oleh karena itu pada masa tersebut perusahaan sulit berkembang. Inflasi sangat tinggi.

Pada tahun 1955 PKI berkembang menjadi salah satu dari 4 partai terbesar Indonesia bersama PNI, Masyumi dan NU. Puncaknya pada 1959 setelah Presiden membubarkan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai partai terbesar, PKI menjadi tiga besar dan berperan strategis dalam pemerintahan dengan deklarasi NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) oleh Presiden Sukarno sebagai ideologi Negara di Indonesia, termasuk *Sheel* yang kemudian menjadi Pertamina.

Di Kalimantan Timur *N.V. Bataafsche Petroleum Matchappij-Sheel (BPM-Sheel)* perusahaan tambang migas milik Belanda dan Inggris, menjadi perusahaan terbesar di Indonesia karena aktivitas Persatuan Buruh Minyak (Perbum) yang berada dibawah SOBSI yang merupakan *Onderbouw* PKI, akhirnya dijual dengan harga murah kepada Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya menjadi aset utama Pertamina. Pembayaran dilakukan dengan angsuran dari keuntungan perusahaan. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar milik asing banyak terjadi lewat jasa buruh. Namun kondisi ekonomi pada masa itu tidak berkembang, inflasi mencapai 6500 persen.

Dalam pemikiran buruh Indonesia, yang ada bukanlah kesadaran kelas buruh melainkan kesadaran etnis, kesadaran kedaerahan, religious/agama, kesadaran sebagai bagian dari komunitasnya, hubungan-hubungan patron klien dan sebagainya. Jarang terdapat buruh yang merasa dieksploitasi sehingga menjadi proletar; melainkan merasa berhutang budi pada majikannya. Mereka berpikir bahwa majikan telah berjasa menghidupi buruh dan keluarganya. Buruh umumnya berpikir bahwa kemiskinannya adalah nasib, yang terbawa oleh kondisinya sendiri, bukan karena eksploitasi kapitalis. Oleh karena itu gerakan buruh tidak cukup hanya menanamkan kesadaran kelas.

Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa penculikan terhadap tokoh-tokoh militer di Jakarta. Menurut pemerintah yang berkuasa dengan dukungan Angkatan darat, peristiwa tersebut dilakukan oleh PKI. Akibatnya gerakan politik buruh lenyap dari bumi Indonesia. Para aktivis buruh dan PKI dibunuh dan sebagian lagi di penjarakan. Mereka tidak memiliki hak politik lagi. Seluruh gerakan buruh dianggap sebagai komunis yang membahayakan negara. Lawan gerakan buruh bukan hanya Angkatan Darat tetapi "seluruh rakyat Indonesia". Sejarah kebesaran gerakan buruh merosot mencapai titik nadirnya. Sesudah partai PKI gagal merebut kekuasaan selanjutnya dilarang dan ditumpas, golongan proletar (golongan yang tidak memiliki apa-apa kecuali anak dan isteri) tidak memiliki pembela lagi. Lipset menyatakan bahwa golongan menengah Indonesia tidak memiliki belas kasihan kepada kelas bawah. Mereka tidak segan untuk menggunakan kekerasan pada rakyat miskin. Pada masa Orde Baru tidak sulit menemukan polisi pamong praja yang menyita barang dagangan dan mengusir pedagang asongan, meskipun sudah menangis menyatakan barang yang disita adalah satu-satunya modal penghidupannya. Pemerintah juga tidak merasa perlu mengambil langkah lebih lanjut setelah mengerahkan polisi bahkan pasukan anti huru-hara menghalau para pemogok yang dirugikan dalam hubungan perburuhan.

Buruh tetap dieksploitasi sebagai unggulan komoditas Negara. Dalam upaya pem-



bangunan ekonomi, pemerintah menjadikan upah buruh yang rendah sebagai unggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Akibatnya buruh menderita, karena tidak memberikan kehidupan yang layak, tidak terdapat jaminan hukum sehingga upah rendah, kondisi kerja buruk, jam kerja kelewat panjang, jaminan sosial, kesehatan dan mutu kerja jauh dari ideal. Seseorang mau menjadi buruh hanya karena terpaksa. Di kalangan simpatisan buruh berkembang perbedaan pendapat dengan Bertolt Brecht bahwa bukanlah komunisme radikal yang kejam tetapi kapitalisme khususnya bagi sayap radikal Islam, misalnya Front Pembela Islam (FPI) gerakan buruh diidentikkan sebagai Partai Komunis Indonesia, yang dianggapnya sebagai perkumpulan orang kafir dan sesat.<sup>17</sup> Upaya membangun Partai Buruh masih dicurigai sebagai kebangkitan kembali PKI yang membahayakan negara. Buruh dan sarekat pekerja tidak memiliki patron partai politik. Buruh dan rakyat proletar menjadi akses partai politik dalam memenangkan pemilu tetapi kurang diperhatikan nasibnya.

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa buruh, dan para pemimpinnya berperan aktif dalam membela dan mempertahankan, bahkan mengisi kemerdekaan, namun ada kesalahan utamanya adalah karena melakukan pemberontakan. Ketika menggunakan dialog, citra buruh dapat berkembang, namun mengalami kehancuran ketika menggunakan kekerasan. Buruh tidak memiliki kesadaran kelas, yang ada adalah kesadaran etnis, persamaan kebudayaan, jenis pekerjaan, persamaan bekerja pada perusahaan yang sama, ke-daerahan, regional, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu buruh bersedia bergabung dengan partai-partai lain yang non komunis. Di perusahaan, tidak terjadi polarisasi antara buruh dan majikan, bahkan seringkali terjadi persaingan dan konflik sesama buruh. Pada kalangan buruh justru terdapat stratifikasi, semakin tinggi status buruh/pekerja dalam perusahaan justru cenderung setia kepada pengusaha.

17

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Fachrudjji. 2005, *Rusia Baru Menuju Demokrasi. Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Anthony Reid. 1996, *Revolusi Nasional Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1996.
- An Laura Stoller, 2005, *Kapitalisme dan Konfrontasi di sabuk perkebunan Sumatra Timur, 1870-1979*, Jakarta: Penerbit Karsa.
- Bambang Sulisty, 1995, *Pemogokan Buruh Suatu Kajian Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana,
- De Javasche Bank, 1952, 222.
- Ericht R. Wolf. 2004, *Perang Petani*: Yogyakarta: Insist Perss.
- Harry A.Poeze. 2006, *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia*. Jilid 1: Agustus 1945- Maret 1945. Jakarta: KITLV.
- Sartono Kartodirdjo, 1987, *Rural Movement in Rural Java*. Kualalumpur, Oxford University Perss.

#### CATATAN AKHIR

1. Tulisan ini pernah disampaikan pada Seminar Bicara Tentang Demokrasi di Indonesia “Keadilan untuk Seluruh Rakyat, yang di selenggarakan oleh Fredericht Ebert Stiftung, Tempo Institute, Aliansi Jurnalistik Indonesia, Jurusan Sejarah Universitas Hasanuddin dan Jurusan Administrasi Negara Universitas Hasanuddin , tanggal 30 Agustus-2 September 2010.
2. Sartono Kartodirdjo dengan karyanya yang berjudul *Rural Movement in Rural Java* membahas tentang protes-protes di pedalaman Jawa pada akhir abad 19 dan awal abad 20, lihat Sartono Kartodirdjo, *Rural Movement in Rural Java* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1987).
3. Bambang Sulistyio, *Pemogokan Buruh Suatu Kajian Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hal. 90. Di Vorstenlanden (daerah Kesultanan di Jawa Tengah) petani sesungguhnya adalah buruh, yang bekerja untuk kepentingan Patuh (pemilik tanah Sultan), pabrik gula, Pemerintah Kesultanan dan Pemerintah Kolonial Belanda. Sarekat sekerja bermunculan karena pengaruh ISDV dan Sarekat Islam.
4. Menurut Sukarno, yang dipengaruhi Marxis, terjadi karena hubungan produksi kapitalis. Jika di Eropa kapitalisme adalah pabrik maka di Indonesia 75 persen adalah di onderneming (perusahaan) gula, teh, tembakau karet, kina dan sebagainya. Jika di Eropa kapitalisme menghasilkan proletar di Indonesia adalah petani yang melarat dan papa.
5. *Ibid.*, hal. 86.
6. *Ibid.*, hal.74.
7. Ann Laura Stoller, *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra Timur, 1870-1979* (Jakarta: Penerbit Karsa, 2005), hal.48.
8. A. Fachruroddji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 109.
9. Laporan Adam Malik dalam Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid 1: Agustus 1945-Maret 1945* (Jakarta: KITLV, 2006), hal. 82 dan 102.
10. Pada waktu itu Sukarno adalah Presiden Indonesia, dan wakilnya Muhammad Hatta.
11. Poeze. *op. cit.*, hal. 113.
12. Anthony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1996), hal. 181.
13. *Ibid.*, hal. 212.
14. *Ibid.*, hal. 215
15. *Ibid.*, hal. 234-235.
16. De Javasche Bank, 1952 , hal. 222.
17. Ericht R. Wolf, *Perang Petani* (Yogyakarta: Insist Press, 2004).